



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA
TAHUN 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional yang pelaksanaannya menjadi komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - b. bahwa salah satu tujuan pelaksanaan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu untuk mewujudkan kesetaraan gender dengan cara menerapkan strategi pengarusutamaan gender di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang dinilai berhasil dalam mendukung terwujudnya kesetaraan gender secara sistematis dan berkelanjutan, perlu diberikan apresiasi dalam bentuk penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Penetapan Penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020;

Mengingat : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2020.

KESATU : ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Menetapkan Penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 yang terdiri atas Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan penghargaan berupa *trophy* dan sertifikat sesuai kategori penghargaan.
- KETIGA : Pendanaan yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2021

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG
PENERIMA PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA
EKAPRAYA TAHUN 2020

PENERIMA PENGHARGAAN
ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA TAHUN 2020

NO.	INSTANSI	KATEGORI
1.	Kementerian Keuangan	Mentor
2.	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Mentor
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Mentor
4.	Kementerian Pertanian	Mentor
5.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Mentor
6.	Kementerian Dalam Negeri	Mentor
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mentor
8.	Provinsi Jawa Timur	Mentor
9.	Provinsi Jawa Tengah	Mentor
10.	Provinsi Sulawesi Selatan	Mentor
11.	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Mentor
12.	Kota Surabaya	Mentor
13.	Kabupaten Rembang	Mentor
14.	Kabupaten Gorontalo	Mentor
15.	Kabupaten Sleman	Mentor
16.	Provinsi Lampung	Utama
17.	Provinsi Sumatera Utara	Utama
18.	Provinsi Sulawesi Utara	Utama
19.	Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Utama
20.	Provinsi Banten	Utama
21.	Provinsi Jambi	Utama
22.	Provinsi Kalimantan Timur	Utama
23.	Provinsi Sumatera Barat	Utama
24.	Provinsi Jawa Barat	Utama
25.	Provinsi Kepulauan Riau	Utama
26.	Provinsi Kalimantan Selatan	Utama
27.	Provinsi Bengkulu	Utama





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	INSTANSI	KATEGORI
28.	Provinsi Bali	Utama
29.	Kabupaten Trenggalek	Utama
30.	Kabupaten Tulungagung	Utama
31.	Kabupaten Blitar	Utama
32.	Kabupaten Malang	Utama
33.	Kabupaten Probolinggo	Utama
34.	Kabupaten Pasuruan	Utama
35.	Kabupaten Jombang	Utama
36.	Kabupaten Madiun	Utama
37.	Kabupaten Ngawi	Utama
38.	Kabupaten Bojonegoro	Utama
39.	Kabupaten Gresik	Utama
40.	Kota Probolinggo	Utama
41.	Kota Batu	Utama
42.	Kota Tangerang	Utama
43.	Kota Tangerang Selatan	Utama
44.	Kabupaten Kutai Kertanegara	Utama
45.	Kabupaten Agam	Utama
46.	Kabupaten Tanah Datar	Utama
47.	Kota Bukittinggi	Utama
48.	Kota Payakumbuh	Utama
49.	Kota Sawahlunto	Utama
50.	Kabupaten Bangka Tengah	Utama
51.	Kabupaten Brebes	Utama
52.	Kabupaten Demak	Utama
53.	Kabupaten Jepara	Utama
54.	Kabupaten Kebumen	Utama
55.	Kabupaten Magelang	Utama
56.	Kabupaten Purworejo	Utama
57.	Kabupaten Sragen	Utama
58.	Kabupaten Temanggung	Utama
59.	Kabupaten Wonosobo	Utama
60.	Kota Magelang	Utama
61.	Kota Pekalongan	Utama
62.	Kota Semarang	Utama
63.	Kabupaten Dompu	Utama
64.	Kabupaten Bogor	Utama
65.	Kabupaten Garut	Utama
66.	Kabupaten Karawang	Utama





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	INSTANSI	KATEGORI
67.	Kabupaten Kuningan	Utama
68.	Kota Sukabumi	Utama
69.	Kota Bandung	Utama
70.	Kota Depok	Utama
71.	Kabupaten Bintan	Utama
72.	Kabupaten Karimun	Utama
73.	Kabupaten Natuna	Utama
74.	Kota Tanjungpinang	Utama
75.	Kota Banjarmasin	Utama
76.	Kota Dumai	Utama
77.	Kabupaten Kubu Raya	Utama
78.	Kabupaten Bone	Utama
79.	Kabupaten Bulukumba	Utama
80.	Kabupaten Luwu Timur	Utama
81.	Kabupaten Maros	Utama
82.	Kabupaten Sinjai	Utama
83.	Kota Makassar	Utama
84.	Kota Parepare	Utama
85.	Kabupaten Gianyar	Utama
86.	Kota Denpasar	Utama
87.	Kabupaten Kulon Progo	Utama
88.	Kementerian Luar Negeri	Madya
89.	Kementerian Pertahanan	Madya
90.	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	Madya
91.	Kementerian Sosial	Madya
92.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Madya
93.	Kementerian Kesehatan	Madya
94.	Provinsi Bangka Belitung	Madya
95.	Provinsi Kalimantan Tengah	Madya
96.	Provinsi Aceh	Madya
97.	Provinsi Riau	Madya
98.	Kabupaten Ponorogo	Madya
99.	Kabupaten Banyuwangi	Madya
100.	Kabupaten Situbondo	Madya
101.	Kabupaten Sidoarjo	Madya
102.	Kabupaten Mojokerto	Madya
103.	Kabupaten Nganjuk	Madya
104.	Kabupaten Magetan	Madya





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	INSTANSI	KATEGORI
105.	Kabupaten Tuban	Madya
106.	Kabupaten Lamongan	Madya
107.	Kabupaten Pamekasan	Madya
108.	Kabupaten Sumenep	Madya
109.	Kota Kediri	Madya
110.	Kota Blitar	Madya
111.	Kota Pasuruan	Madya
112.	Kota Mojokerto	Madya
113.	Kota Madiun	Madya
114.	Kabupaten Lebak	Madya
115.	Kabupaten Serang	Madya
116.	Kabupaten Tangerang	Madya
117.	Kota Cilegon	Madya
118.	Kota Serang	Madya
119.	Kabupaten Musi Banyuasin	Madya
120.	Kabupaten Merangin	Madya
121.	Kota Jambi	Madya
122.	Kabupaten Mamuju	Madya
123.	Kabupaten Padang Pariaman	Madya
124.	Kabupaten Pasaman	Madya
125.	Kabupaten Pasaman Barat	Madya
126.	Kabupaten Pesisir Selatan	Madya
127.	Kota Padang	Madya
128.	Kota Solok	Madya
129.	Kabupaten Bangka	Madya
130.	Kota Bandar Lampung	Madya
131.	Kabupaten Lampung Selatan	Madya
132.	Kabupaten Lampung Tengah	Madya
133.	Kabupaten Lampung Timur	Madya
134.	Kota Metro	Madya
135.	Kabupaten Banyumas	Madya
136.	Kabupaten Batang	Madya
137.	Kabupaten Cilacap	Madya
138.	Kabupaten Grobogan	Madya
139.	Kabupaten Klaten	Madya
140.	Kabupaten Kudus	Madya
141.	Kabupaten Pati	Madya
142.	Kabupaten Pekalongan	Madya
143.	Kabupaten Pemalang	Madya





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO.	INSTANSI	KATEGORI
144.	Kabupaten Tegal	Madya
145.	Kota Salatiga	Madya
146.	Kota Surakarta	Madya
147.	Kota Tegal	Madya
148.	Kabupaten Deli Serdang	Madya
149.	Kota Padangsidempuan	Madya
150.	Kota Mataram	Madya
151.	Kabupaten Lombok Barat	Madya
152.	Kabupaten Bandung Barat	Madya
153.	Kabupaten Ciamis	Madya
154.	Kabupaten Cirebon	Madya
155.	Kabupaten Majalengka	Madya
156.	Kabupaten Sukabumi	Madya
157.	Kota Banjar	Madya
158.	Kota Bekasi	Madya
159.	Kota Cirebon	Madya
160.	Kota Tasikmalaya	Madya
161.	Kabupaten Sumedang	Madya
162.	Kota Bogor	Madya
163.	Kabupaten Lingga	Madya
164.	Kota Batam	Madya
165.	Kabupaten Balangan	Madya
166.	Kota Banjarbaru	Madya
167.	Kabupaten Tabalong	Madya
168.	Kabupaten Tapin	Madya
169.	Kota Pekanbaru	Madya
170.	Kabupaten Bengkulu Utara	Madya
171.	Kota Pontianak	Madya
172.	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Madya
173.	Kabupaten Bantaeng	Madya
174.	Kabupaten Janeponto	Madya
175.	Kabupaten Luwu Utara	Madya
176.	Kabupaten Pangkajene	Madya
177.	Kabupaten Soppeng	Madya
178.	Kabupaten Takalar	Madya
179.	Kabupaten Wajo	Madya
180.	Kabupaten Gowa	Madya
181.	Kabupaten Luwu	Madya
182.	Kota Palopo	Madya





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

NO.	INSTANSI	KATEGORI
183.	Kabupaten Badung	Madya
184.	Kabupaten Buleleng	Madya
185.	Kabupaten Jembrana	Madya
186.	Kabupaten Karangasem	Madya
187.	Kabupaten Bantul	Madya
188.	Kota Yogyakarta	Madya
189.	Provinsi Sumatera Selatan	Pratama
190.	Provinsi Sulawesi Tenggara	Pratama
191.	Provinsi Sulawesi Barat	Pratama
192.	Provinsi Maluku Utara	Pratama
193.	Provinsi Papua	Pratama
194.	Provinsi Gorontalo	Pratama
195.	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pratama
196.	Provinsi Sulawesi Tengah	Pratama
197.	Kabupaten Pacitan	Pratama
198.	Kabupaten Kediri	Pratama
199.	Kabupaten Lumajang	Pratama
200.	Kabupaten Jember	Pratama
201.	Kabupaten Bondowoso	Pratama
202.	Kabupaten Bangkalan	Pratama
203.	Kabupaten Sampang	Pratama
204.	Kota Malang	Pratama
205.	Kabupaten Pendeang	Pratama
206.	Kabupaten Banyuwangi	Pratama
207.	Kabupaten Lahat	Pratama
208.	Kabupaten Musi Rawas	Pratama
209.	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Pratama
210.	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Pratama
211.	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Pratama
212.	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Pratama
213.	Kota Lubuklinggau	Pratama
214.	Kota Pagar Alam	Pratama
215.	Kota Palembang	Pratama
216.	Kota Prabumulih	Pratama
217.	Kabupaten Batanghari	Pratama
218.	Kabupaten Bungo	Pratama
219.	Kabupaten Tebo	Pratama
220.	Kabupaten Paser	Pratama
221.	Kabupaten Penajam Paser Utara	Pratama





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO.	INSTANSI	KATEGORI
222.	Kota Balikpapan	Pratama
223.	Kota Samarinda	Pratama
224.	Kota Kendari	Pratama
225.	Kabupaten Majene	Pratama
226.	Kabupaten Polewali Mandar	Pratama
227.	Kota Ternate	Pratama
228.	Kabupaten Dharmasraya	Pratama
229.	Kabupaten Lima Puluh Kota	Pratama
230.	Kabupaten Sijunjung	Pratama
231.	Kabupaten Solok	Pratama
232.	Kota Padangpanjang	Pratama
233.	Kota Pariaman	Pratama
234.	Kabupaten Boven Digoel	Pratama
235.	Kabupaten Belitung Timur	Pratama
236.	Kota Pangkal Pinang	Pratama
237.	Kabupaten Lampung Barat	Pratama
238.	Kabupaten Pesawaran	Pratama
239.	Kabupaten Tanggamus	Pratama
240.	Kabupaten Way Kanan	Pratama
241.	Kabupaten Tulang Bawang	Pratama
242.	Kabupaten Pringsewu	Pratama
243.	Kabupaten Mesuji	Pratama
244.	Kabupaten Pesisir Barat	Pratama
245.	Kabupaten Lampung Utara	Pratama
246.	Kabupaten Katingan	Pratama
247.	Kabupaten Kotawaringin Barat	Pratama
248.	Kabupaten Kotawaringin Timur	Pratama
249.	Kabupaten Lamandau	Pratama
250.	Kabupaten Murung Raya	Pratama
251.	Kota Palangka Raya	Pratama
252.	Kabupaten Banjarnegara	Pratama
253.	Kabupaten Blora	Pratama
254.	Kabupaten Boyolali	Pratama
255.	Kabupaten Karanganyar	Pratama
256.	Kabupaten Kendal	Pratama
257.	Kabupaten Purbalingga	Pratama
258.	Kabupaten Semarang	Pratama
259.	Kabupaten Wonogiri	Pratama
260.	Kabupaten Batu Bara	Pratama





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

NO.	INSTANSI	KATEGORI
261.	Kabupaten Karo	Pratama
262.	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Pratama
263.	Kabupaten Mandailing Natal	Pratama
264.	Kabupaten Samosir	Pratama
265.	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pratama
266.	Kota Gunungsitoli	Pratama
267.	Kota Medan	Pratama
268.	Kota Sibolga	Pratama
269.	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Pratama
270.	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Pratama
271.	Kabupaten Minahasa	Pratama
272.	Kota Bitung	Pratama
273.	Kota Kotamobagu	Pratama
274.	Kota Manado	Pratama
275.	Kabupaten Aceh Barat	Pratama
276.	Kabupaten Aceh Timur	Pratama
277.	Kabupaten Bireuen	Pratama
278.	Kota Sabang	Pratama
279.	Kabupaten Bone Bolango	Pratama
280.	Kabupaten Gorontalo Utara	Pratama
281.	Kota Gorontalo	Pratama
282.	Kota Jakarta Timur	Pratama
283.	Kota Jakarta Barat	Pratama
284.	Kota Jakarta Utara	Pratama
285.	Kabupaten Kepulauan Seribu	Pratama
286.	Kabupaten Bima	Pratama
287.	Kabupaten Bandung	Pratama
288.	Kabupaten Bekasi	Pratama
289.	Kabupaten Cianjur	Pratama
290.	Kabupaten Gunungkidul	Pratama
291.	Kabupaten Kepulauan Anambas	Pratama
292.	Kabupaten Banjar	Pratama
293.	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Pratama
294.	Kabupaten Tanah Bumbu	Pratama
295.	Kabupaten Indragiri Hilir	Pratama
296.	Kabupaten Indragiri Hulu	Pratama
297.	Kabupaten Kuantan Singingi	Pratama
298.	Kabupaten Rokan Hilir	Pratama
299.	Kabupaten Rokan Hulu	Pratama





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO.	INSTANSI	KATEGORI
300.	Kabupaten Bengkulu Tengah	Pratama
301.	Kabupaten Kepahiang	Pratama
302.	Kabupaten Lebong	Pratama
303.	Kabupaten Seluma	Pratama
304.	Kabupaten Enrekang	Pratama
305.	Kabupaten Kepulauan Selayar	Pratama
306.	Kabupaten Sidenreng Rappang	Pratama
307.	Kabupaten Klungkung	Pratama
308.	Kabupaten Tabanan	Pratama

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓

